

ANALISIS ALOKASI DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DALAM PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MEDAN SINEMBAH

Nurul Fadhilah Yusri Kembaren¹
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
nurulldilaa@gmail.com¹

Wahyu Syarvina²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
wahyusyarvina@gmail.com²

Nur Ahmadi Bi Rahmani³
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
nurahmadibr@gmail.com³

Revisions Required 2024-06-25 | Revisions Required 2024-07-22 | Accept Submission 2024-07-28

The aim of this research is to determine the allocation of village funds to poverty in increasing the economic growth of Medan Sinembah Village. The method used in this research is descriptive qualitative with primary data sources. In this research, data was obtained from informants by direct interviews with parties who understand the distribution of Village Fund Allocations (ADD) to Medan Sinembah Village. The technique of qualitative data analysis using secondary data in this study involves collecting data from relevant sources such as government reports and statistics, then analyzing it through identifying main themes, categorizing, and interpreting to understand the relationship between village fund allocation, poverty, and economic growth in Medan Sinembah Village. The results of the research show that village funds are not distributed evenly, the distribution of funds is not on target, such as funds being distributed to people who have sufficient economic conditions while poor people do not receive village funds, and Village Fund Allocation (ADD) cannot increase economic growth in Medan Sinembah Village due to many other needs. The amount of funds provided by the government is not distributed properly to the people. Therefore, it can be recommended that more attention be paid to collecting data on the distribution of funds so that they are rightly targeted to the people who need them, and distribute all the funds provided by the government or at least 80% of government funds so that Medan Sinembah Village can increase economic growth with sufficient funds.

Keywords: ADD, Poverty, Economic Growth

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi permasalahan yang serius bagi seluruh negara di dunia, terutama untuk negara-negara yang tengah mengalami perkembangan. Upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama setiap negara. Sulitnya mengatasi kemiskinan membuatnya menjadi perhatian utama pemerintah.

Beberapa faktor seperti kondisi ekonomi yang krisis, pola hidup, dan kebudayaan masyarakat Indonesia dapat menjadi penyebab kemiskinan yang sulit dihindari. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-2030. Sebagai anggota PBB, Indonesia menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai fokus utama dalam pembangunan nasional, sesuai dengan

Undang-Undang Dasar 1945 yang memerintahkan peningkatan kesejahteraan umum. Kemiskinan merujuk pada keterbatasan individu dalam memenuhi keperluan pokok seperti makanan, pakaian, residensi (tempat tinggal), dan pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Hak-hak dasar masyarakat mencakup kecukupan pangan, akses kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, perumahan, pasokan air bersih, tanah, sumber daya alam, lingkungan yang bersih, serta rasa aman dari tindakan kekerasan atau ancaman, dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan sosial dan politik, tanpa memandang jenis kelamin. (Dewi & Irama, 2018).

Desa merupakan komponen dalam struktur pemerintah. Interaksi langsung dengan masyarakat adalah kunci dalam

pelaksanaan kebijakan pemerintah, baik dari pemerintah pusat ataupun daerah. Maka dari itu, melibatkan desa dalam setiap tahapan kebijakan sangat penting untuk keberhasilannya. Undang-Undang juga memberikan wewenang kepada desa untuk mengurus, mengelola, dan melaksanakan tanggung jawab rumah tangga sendiri, termasuk dalam mengatur Alokasi Dana Desa (ADD). Beberapa tujuan dari ADD antara lain: Memperbaiki kondisi sosial dengan menghilangkan kemiskinan serta mengurangi disparitas ekonomi, sambil meningkatkan proses perencanaan secara efektif, dan alokasi anggaran untuk pembangunan di tingkat desa serta pemberdayaan masyarakat, memperkuat prasarana desa, memperkuat nilai-nilai lokal, meningkatkan ketenangan dan keteraturan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga desa untuk memajukan kegiatan sosial dan ekonomi, mendorong kemandirian dan kerjasama antarwarga, serta meningkatkan pemasukan desa dan penduduknya lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Mamonto dkk., t.t.).

Secara spesifik, rencana kegiatan pemerintahan desa yang langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan dan penyediaan layanan yang lebih terarah, fokus, dan lancar kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan standar hidup yang memadai dan sejahtera untuk penduduk desa serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum. Dari penelitian yang dilakukan, Alokasi Dana Desa pada Desa Medan

Sinembah tidak tersalurkan secara merata, dimana penyaluran dana tidak tepat sasaran dikarenakan dana disalurkan pada orang yang kehidupannya berkecukupan sedangkan yang miskin tidak mendapatkan dana tersebut. Kemajuan dalam mengelola dana desa dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengalokasian dana anggaran guna menyediakan berbagai keperluan penduduk. (Pasaribu dkk., 2023).

Desa Medan Sinembah merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Tanjung Morawa, kabupaten Deli Serdang yang juga mendapatkan ADD seperti desa-desa lainnya di Indonesia. Berdasarkan data penduduk desa Medan Sinembah berjumlah 9.291 jiwa, dengan bekerja sebagai Wiraswasta 1.716 jiwa, Pedagang 955 jiwa, Karyawan Swasta 1.089 jiwa, Buruh Harian Lepas 1.580, Perangkat Desa 15 jiwa, Peternak 50 jiwa, Petani/Berkebun 150 jiwa, Dokter 2 jiwa, Sopir 30 jiwa, Bidan/Perawat 10 jiwa, PNS 30 jiwa, TNI 10 jiwa, Polri 10 jiwa, Guru 50 jiwa, Dosen 5 jiwa, Pensiunan, Pelajar/Mahasiswa 1.200, IRT 1.104, Belum/Tidak Bekerja 1.204 jiwa.

Gambar 1.1 Tabel penerimaan Alokasi Dana Desa pada tingkat Kemiskinan Desa Medan Sinembah tahun 2021 -2023

Tahun	Jumlah Penerima BLT per Tahun	Tingkat Kemiskinan per Tahun
2021	111 Orang	0,012 %
2022	118 Orang	0,013 %
2023	96 Orang	0,0103 %

Sumber : Kepala Desa Medan Sinembah

Ket : Jumlah penduduk seluruhnya = 9.291 Orang
Tingkat Kemiskinan =

$$\frac{\text{Jumlah Penerima BLT}}{\text{Jumlah Penduduk Seluruhnya}}$$

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan Desa Medan Sinembah pada tahun 2022 adalah sebesar 0,013%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun presentasinya kecil, masih ada beberapa masyarakat di daerah tersebut yang mengalami kekurangan dalam kondisi sosial-ekonomi. Kemudian Alokasi Dana Desa yang tidak disalurkan dengan baik dimana hanya sekitar 3,75% dana yang disalurkan kepada masyarakat Desa Medan Sinembah.

Alokasi dana desa dapat sangat berpengaruh bagi masyarakat miskin karena dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, memberdayakan ekonomi lokal, dan juga meningkatkan kemudahan akses terhadap layanan-layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan (Zannah dkk., 2024). Namun, efektivitasnya tergantung pada pengelolaan dan penggunaan dana yang transparan serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Alokasi dana desa dapat berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Penggunaan dana desa yang efektif dan tepat sasaran dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pasokan air bersih, dan jaringan listrik, sekaligus meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan dan pendidikan. Program-program pemberdayaan ekonomi lokal juga menjadi

bagian penting dari upaya ini dan pelatihan keterampilan juga dapat membantu mengangkat masyarakat dari kemiskinan dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mereka. (Hardianto, 2022)

Semua dana yang terkait dengan tugas pemerintah yang dialokasikan kepada daerah dianggap sebagai pendapatan daerah. Daerah memiliki hak untuk memperoleh pendapatan seperti: jaminan tersedianya dana dari pemerintah sesuai dengan tugas yang dialokasikan; wewenang untuk mengenakan dan menggunakan pajak serta biaya daerah; hak untuk menerima pembagian hasil dari kekayaan alam negara yang berlokasi di wilayah setempat, serta alokasi dana perimbangan lainnya, termasuk dalam hak-hak tersebut. Demikian pula, hak untuk mengelola kekayaan daerah, memperoleh pendapatan tambahan yang legal, dan mencari sumber pembiayaan juga diatur dalam pengaturan ini. Prinsip yang diterapkan oleh pemerintah adalah bahwa dana dialokasikan berdasarkan fungsi-fungsinya. (Arina dkk., 2021)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kebijakan Dana Desa merupakan salah satu program utama yang diutamakan oleh pemerintah yang mengalami peningkatan signifikan setiap tahun dari 2015 hingga 2019. Undang-Undang tersebut memberikan desa wewenang yang besar untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mengelola pembangunan dan keuangan desa. Harapannya, pemanfaatan anggaran desa dapat mengurangi kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan antar desa dengan

meningkatkan layanan publik di tingkat desa. Selain itu, dengan merangsang pertumbuhan ekonomi di desa, diharapkan disparitas pembangunan antar desa dapat berkurang dan fungsi penduduk desa sebagai agen pembangunan dapat diperkuat. (Wibowo dkk., 2019).

Tugas utama sebuah negara adalah untuk menghilangkan kemiskinan dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya. Kewajiban pemerintah ini juga dipertegas dengan firman Allah SWT dalam surah at-Taubah: 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Surah At-Taubah ayat 29 menyatakan, "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (mengamalkan) agama yang benar-benar dinisbatkan kepada-Nya di antara orang-orang yang diberi kitab (Yahudi dan Nasrani), hingga mereka membayar jizyah dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk."

Penanggulangan kemiskinan dapat dicapai melalui berbagai alternatif, termasuk peningkatan pembangunan dari pihak berwenang, peningkatan akses pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mengelola potensi alam lokal. Faktor-faktor penyebab kemiskinan meliputi pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan global yang lambat, rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian dalam teknologi, keterbatasan sumber daya alam, pertumbuhan

populasi yang cepat, dan ketidakstabilan politik.

Pertumbuhan ekonomi adalah evolusi kontinu kondisi ekonomi suatu negara menuju perbaikan kondisi yang lebih baik dalam jangka waktu yang spesifik. Hal ini tercermin dalam peningkatan kapasitas produksi ekonomi dan pendapatan nasional. Namun, pertumbuhan ekonomi yang lemah dapat berdampak negatif terhadap produktivitas, yang mungkin memerlukan langkah-langkah seperti pengurangan jumlah tenaga kerja dan inisiatif untuk mengurangi biaya pelepasan tenaga kerja melalui pemutusan hubungan kerja (PHK).

Meskipun penanggulangan kemiskinan dapat dicapai melalui berbagai alternatif seperti peningkatan pembangunan, akses pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia, penelitian ini menemukan kesenjangan yang signifikan terkait dengan efektivitas alokasi dana desa dalam konteks lokal spesifik seperti Desa Medan Sinembah. Penelitian sebelumnya kurang menyoroti dampak langsung alokasi dana desa terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa, seringkali mengandalkan data primer dan pendekatan tunggal yang tidak mempertimbangkan variabel kompleks dan dinamis di lapangan. Penelitian ini mengatasi kesenjangan tersebut dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara tematik dan kuantitatif, serta memberikan fokus khusus pada konteks lokal Desa Medan Sinembah. Selain itu, pendekatan baru yang diperkenalkan dalam penelitian ini mencakup analisis hubungan antara dana desa dan pertumbuhan ekonomi yang belum banyak dieksplorasi, menawarkan perspektif yang

lebih komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk optimalisasi penggunaan dana desa.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produksi suatu ekonomi yang direalisasikan melalui peningkatan pendapatan nasional. Pada Desa Medan Sinembah, pertumbuhan ekonomi juga tidak bisa ditingkatkan karena banyaknya kebutuhan lainnya sementara dana yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan. Pembangunan daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan. Sasaran utama dari pembangunan nasional adalah meningkatkan performa ekonomi guna menyediakan peluang pekerjaan dan meningkatkan standar hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di setiap wilayah, pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan meningkat. (Susilowati dkk., 2017).

Dengan fenomena latar belakang yang terjadi dan research gap yang ditemukan penulis. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana dana desa disalurkan terhadap kemiskinan serta mengetahui peningkatan pertumbuhan ekonomi terhadap masyarakat miskin di desa Medan Sinembah.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kemiskinan

Teori Kemiskinan yang berfokus pada definisi dan jenis-jenis kemiskinan seperti kemiskinan relatif, mutlak, struktural, dan kultural merupakan teori yang relevan untuk penelitian ini. Menggunakan teori kemiskinan

memungkinkan analisis yang mendalam tentang bagaimana berbagai bentuk kemiskinan mempengaruhi masyarakat di Desa Medan Sinembah. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja untuk memahami kemiskinan dari berbagai perspektif, baik dari segi kekurangan material (kemiskinan mutlak) maupun ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup yang dianggap layak dalam masyarakat (kemiskinan relatif). Selain itu, teori ini mengkaji kemiskinan struktural sebagai akibat dari ketidakadilan dalam sistem sosial dan ekonomi serta kemiskinan kultural yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang menghambat peluang. Dengan memahami kemiskinan dari sudut pandang ini, penelitian dapat mengevaluasi bagaimana alokasi dana desa dapat secara efektif mengatasi berbagai dimensi kemiskinan dan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang koordinasi pelayanan masyarakat, pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada pendekatan berbasis hak. Dalam pendekatan ini setiap anggota masyarakat memiliki hak dasar yang sama. Kemiskinan, maka dari itu dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang mengalami kesulitan dalam menegakkan dan meningkatkan taraf hidupnya.

Kemiskinan memiliki beberapa jenis, antara lain:

1. Kemiskinan relatif
2. Kemiskinan mutlak
3. Kemiskinan struktural
4. Kemiskinan kultural

Dalam Alquran, Surat al-Ra'd: ayat 26, disebutkan bahwa Allah mengatur luasnya rezeki dan memberikan keterbatasan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Menurut Nurwati, kemiskinan dapat dianggap sebagai kendala multidimensional karena terkait dengan keterbatasan akses dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan interaksi di masyarakat. Penanggulangan kemiskinan akan kurang efektif tanpa dukungan kebijakan fiskal yang menunjukkan perhatian pada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan untuk mengevaluasi hubungan antara kebijakan fiskal seperti upaya dengan maksud mengurangi tingkat kemiskinan.

Teori Konflik

Teori Konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels (1848) merupakan grand teori yang paling mendekati dan relevan. Teori Konflik menjelaskan bagaimana kemiskinan tidak hanya sebagai hasil dari ketidakmampuan individu tetapi sebagai akibat dari ketidaksetaraan struktural dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat. Marx dan Engels mengemukakan bahwa ketidaksetaraan ini sering kali memanifestasikan diri dalam bentuk kemiskinan yang sistemik, di mana kelompok dominan mengendalikan sumber daya dan kekuasaan, meninggalkan kelompok yang lebih lemah dalam kondisi yang sulit. Dalam konteks alokasi dana desa, teori ini membantu memahami bagaimana ketimpangan dalam distribusi dana dan sumber daya dapat memperkuat atau mengurangi kemiskinan, serta bagaimana dinamika kekuasaan lokal dapat

mempengaruhi efektivitas program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Desa Medan Sinembah (Tinambunan dkk., 2023).

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa merupakan tonggak penting dalam pembangunan infrastruktur di desa, diatur oleh Undang-Undang Tentang Desa No. 72 Tahun 2005. Menurut undang-undang tersebut, alokasi dana desa (ADD) dianggap sebagai sumber utama pendapatan desa, diperoleh dari anggaran dan perimbangan apabila belanja minimal 110% untuk desa tercapai. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah pedesaan.

Perhitungan alokasi dana desa melibatkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Prinsip kesetaraan menjamin besaran yang sama untuk setiap desa (Alokasi Dana Desa Minimal-ADDM), sementara prinsip keadilan menggunakan Nilai Bobot Desa (BDx) yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, dan kesehatan. Dengan demikian, alokasi dana desa tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan dan potensi masing-masing desa.

Salah satu cara pemerintah membantu pemerintah daerah mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan adalah melalui distribusi subsidi desa. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan inisiatif pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan memenuhi kebutuhan lokal.

Oleh karena itu, penyaluran dana desa memainkan peran strategis yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan akses terhadap layanan penting seperti kesehatan dan pendidikan. (Tinambunan dkk., 2023).

Tujuan alokasi dana desa (ADD) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan wilayah hukumnya.
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat desa dalam menyelenggarakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan secara partisipatif dan selaras dengan potensi desa.
3. Meningkatkan distribusi pendapatan, peluang kerja, dan peluang usaha bagi penduduk desa.
4. Mendorong peningkatan semangat swadaya dan gotong royong di masyarakat desa.

Pemerintah berharap bahwa implementasi program alokasi dana desa akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dianggap sebagai langkah penting untuk mempercepat pembangunan pedesaan dengan menyediakan fasilitas untuk memberdayakan masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan

ekonomi yang tangguh dan efektif di daerah tersebut. (Tinambunan dkk., 2023).

Pertumbuhan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi suatu negara dapat diukur dari kondisi ekonominya. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam menilai kesuksesan pembangunan, karena menjadi sumber utama dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pandangan para ahli klasik, terdapat empat elemen yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni populasi dan produksi barang dan jasa yang dijual, luas lahan dan jumlah modal yang dimiliki, serta tingkat teknologi yang digunakan (N. H. Lubis & Syarvina, 2023). Meskipun mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada banyak faktor, ilmu ekonomi klasik menekankan pentingnya perilaku individu dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Perspektif Schumpeter terhadap teori pertumbuhan menyatakan bahwa analisis dimulai dengan anggapan bahwa perekonomian tidak tumbuh. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama karena sejumlah pebisnis menyadari adanya kemungkinan-kemungkinan penemuan yang menguntungkan. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi melambat seiring dengan kecanggihan ekonomi karena semakin sedikitnya peluang untuk berinovasi di negara-negara maju. Perekonomian pada akhirnya mencapai “negara non-pembangunan” atau “negara stasioner” pada suatu saat. Namun Schumpeter berpendapat bahwa keadaan ini muncul ketika ekspansi ekonomi mencapai tingkat yang tinggi, dan

hal ini bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perekonomian memiliki pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang dijelaskan oleh Teori Harrod-Domar yang digunakan untuk meneliti pertumbuhan ekonomi. Mereka membuat asumsi-asumsi berikut: rasio modal-produksi tetap, tabungan sebanding dengan pendapatan nasional, barang modal mencapai kapasitas maksimumnya, dan perekonomian terbagi menjadi dua sektor.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, di mana penulis mengumpulkan informasi dari realitas yang ada di dalam organisasi dan menyajikannya dalam bentuk narasi. Sumber data pokok yang digunakan adalah data primer, yang merupakan informasi langsung dari sumbernya, seperti pendapat, observasi, serta hasil penelitian dari individu maupun kelompok.

Teknik analisis data kualitatif dengan data sekunder pada penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber yang relevan seperti laporan pemerintah dan statistik, kemudian menganalisisnya melalui identifikasi tema-tema utama, kategorisasi, dan interpretasi untuk memahami hubungan antara alokasi dana desa, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi di Desa Medan Sinembah.

Penelitian ini menggunakan wawancara langsung dengan tiga orang informan yang bernama Puspitta Sari, Riyan, dan Hermawan di Desa Medan Sinembah,

kecamatan Tanjung Morawa, kabupaten Deli Serdang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan pedoman wawancara, serta pencarian data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, peraturan, dan laporan terkait. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif, termasuk reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 3 (tiga) orang informan yang bernama Puspitta Sari, Riyan, dan Hermawan, dapat diketahui bahwa dana desa yang tidak tersalurkan dengan merata, penyaluran dana yang tidak tepat sasaran seperti dana yang disalurkan kepada orang yang mempunyai ekonomi berkecukupan sedangkan orang yang miskin tidak mendapatkan dana desa. Kesesuaian Rencana kegiatan yang disesuaikan dalam pengelolaan ADD di Desa sesuai dengan tuntutan masyarakat Medan Sinembah adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pengelolaan ADD yang dialokasikan ke Desa Medan Sinembah akan membantu pemerintah desa dalam meraih kesuksesan dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Dengan demikian, pentingnya kecocokan antara program kegiatan dan kebutuhan masyarakat dijelaskan sebagai aspek utama, di mana setiap kegiatan yang dilaksanakan

diharapkan membuat sesuatu yang bermanfaat langsung yang dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Desa Medan Sinembah.

Gambar 1.2 Tabel penerimaan Alokasi Dana Desa pada tingkat Kemiskinan Desa Medan Sinembah tahun 2021 -2023

Tahun	Jumlah Penerima BLT per Tahun	Tingkat Kemiskinan per Tahun
2021	111 Orang	0,012 %
2022	118 Orang	0,013 %
2023	96 Orang	0,0103 %

Sumber : Kepala Desa Medan Sinembah

Ket : Jumlah penduduk seluruhnya = 9.291 Orang

Tingkat Kemiskinan =

$$\frac{\text{Jumlah Penerima BLT}}{\text{Jumlah Penduduk Seluruhnya}}$$

Tabel 1.3 Penerimaan ADD Per Tahun 2021 – 2023 Desa Medan Sinembah

Tahun	Jumlah Dana	Uraian	KP MBLT	Total Diterima
2021	Rp. 1.028.707.000	Dana Desa	118	3.600.000 × 118 = 424.800.000
2022	Rp. 938.666.000	Dana Desa	111	3.600.000 × 111 = 399.600.000
2023	Rp.	Dana	96	3.600.000

	1.386.145.000	Desa		$0 \times 96 = 345.600.000$
--	---------------	------	--	-----------------------------

Sumber : Kepala Desa Medan Sinembah

Dari tabel di atas terlihat bahwa penyaluran ADD setiap tahunnya tidak sesuai dengan jumlah uang yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dana yang diberikan kepada masyarakat hanya Rp. 300.000 per bulannya. Data tersebut juga menjelaskan pada tahun 2021 hanya Rp. 424.800.000 yang disalurkan kepada masyarakat Desa Medan Sinembah dari total dana yang diberikan pemerintah sebesar Rp. 1.028.707.000, pada tahun 2022 dana yang diterima hanya Rp. 399.600.000 dari total dana Rp. 938.666.000, dan pada tahun 2023 dana yang diterima masyarakat hanya Rp. 345.600.000 dari total dana Rp. 1.386.145.000.

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Medan Sinembah yang terdapat pada tabel tersebut menunjukkan dampak yang terbatas terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) menunjukkan fluktuasi, penurunan tingkat kemiskinan dari 0,012% pada tahun 2021 menjadi 0,0103% pada tahun 2023 tidak signifikan, mengindikasikan bahwa bantuan tersebut belum cukup untuk secara substansial mengurangi kemiskinan. Dana BLT yang hanya sekitar Rp 300.000 per bulan tampaknya tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Selain itu, alokasi ADD yang tidak sepenuhnya digunakan untuk proyek-proyek pengembangan ekonomi atau infrastruktur

menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, dengan distribusi dana yang hanya sekitar 25-41% dari total yang diterima, membatasi potensi investasi dalam pembangunan yang dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja. Dampak tersebut menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan distribusi dana untuk mencapai hasil yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas terlihat bahwa masyarakat tidak menerima distribusi yang memadai dari jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah Desa Medan Sinembah. Dimana secara umum terlihat bahwa dana yang disalurkan hanya sekitar $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah dana yang diberikan pemerintah bahkan pada tahun 2023 tidak sampai $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah dana yang diberikan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat pertumbuhan ekonomi Desa Medan Sinembah tidak bisa meningkat dengan Alokasi Dana Desa (ADD) karena masih banyak kebutuhan lainnya.

Evaluasi terhadap ADD menunjukkan perlunya perbaikan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Dana yang disalurkan tidak sepenuhnya memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan penggunaan dana untuk proyek pengembangan ekonomi atau infrastruktur tampak terbatas. Untuk meningkatkan efektivitas ADD, perlu dilakukan evaluasi mendalam terkait alokasi dan distribusi dana, memastikan bahwa bantuan yang diberikan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Reformasi dalam pengelolaan dana dan peningkatan partisipasi komunitas dalam perencanaan dan implementasi dapat membantu mencapai tujuan utama ADD dalam mengurangi kemiskinan dan memajukan ekonomi desa.

Pembahasan

Khususnya di Desa Medan Sinembah, koordinasi antara masyarakat dan perangkat desa menjadi bagian krusial dalam pengelolaan dana desa (ADD). Tujuannya adalah merencanakan dan memprioritaskan program pembangunan yang dianggap penting atau mendesak oleh masyarakat, sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan. Pengelolaan ADD harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, mengamati setiap detail kegiatan, agar setiap program yang dijalankan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sambil mengamati besarnya jumlah dana yang tersedia. Ketepatan dalam penganggaran dianggap sebagai hal yang krusial dalam menjalankan semua kegiatan atau program yang diperlukan oleh masyarakat terkait. (Kehik & Mael, t.t.)

Oleh karena itu, dalam pengelolaan ADD, perhitungan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan secara profesional untuk memastikan keselarasan antara skala pekerjaan yang dilaksanakan dan dana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan proyek pembangunan. Hal ini diperlukan agar ada keseimbangan antara volume pekerjaan yang direncanakan dengan anggaran yang tersedia, sehingga dapat memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan

pembangunan dengan dana yang disiapkan. (Nondangari, 2023). Rapat perencanaan pembangunan atau musrenbang diadakan setiap awal tahun untuk menyusun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa). Rencana tanpa anggaran cenderung hanya sekedar dokumen formal, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) selalu disusun secara beriringan dengan dokumen RKP Desa. Kedua teks ini saling berkaitan dan dikembangkan melalui proses musyawarah dan mufakat. Mengingat RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen publik, maka Pemerintah Desa mempunyai tugas untuk menginformasikan informasi publik kepada masyarakat sebagai lembaga publik. (Waworuntu et al, 2022).

Kegiatan yang dibiayai Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh walikota atau bupati terkait. Mempekerjakan tenaga kerja dari masyarakat desa sekitar mendapat prioritas pertama, dan tugas ini akan diselesaikan secara mandiri dengan menggunakan bahan mentah dan sumber daya lokal. Tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat pengangguran sehingga Dana Desa dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan dan memacu pembangunan ekonomi lokal. (Wibowo dkk, 2019).

Besarnya uang yang diberikan pemerintah kabupaten atau kota kepada desa disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana ini bersumber dari sisa dana daerah yang diterima pemerintah pusat dan daerah. Dana desa digunakan untuk mendukung perekonomian lokal, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, dan kebutuhan pembangunan lainnya. Pendapatan desa

berasal dari pajak daerah berimbang dan dana yang disalurkan ke desa secara proporsional oleh kabupaten dan kota atas nama pemerintah pusat dan daerah. Lubis, A.W., dan Nurwansyah, 2020).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020, perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, menyatakan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) menerima Langsung Desa Bantuan Tunai (BLT) untuk jangka waktu enam bulan. Pembayaran Rp 600.000 untuk tiga bulan pertama dan Rp 300.000 untuk tiga bulan berikutnya. Sebanyak Rp31,79 triliun atau sekitar 44,65% Dana Desa diberikan untuk program ini; pencairan Dana Desa dimulai sejak April 2020. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 yang mengatur besaran dana tunai yang dapat ditransfer dari daerah pusat ke daerah, desa dapat menerima Rp 30–40 triliun melalui penggunaan mekanisme ADD. Alokasi Dana Desa merupakan sumber pendanaan yang sangat penting bagi program-program yang dijalankan desa. Persoalan kemiskinan masih terus terjadi, meskipun dana masyarakat cukup besar, dan tidak mudah untuk diselesaikan. (Aryani & Rimawan, n.d.).

Desa merupakan pemimpin dalam mencapai keberhasilan dalam seluruh inisiatif dan kegiatan pemerintah. Program pembangunan desa pada dasarnya adalah langkah menuju kemajuan bagi desa itu sendiri. Meskipun alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Medan Sinembah mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat secara menyeluruh,

namun jika melihat dari sisi alokasi yang diterima, jumlahnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini agar proyek pembangunan yang dilakukan bisa disesuaikan dengan dana yang tersedia, sehingga dapat digunakan secara efektif untuk menjalankan berbagai program pembangunan yang ada. (Abdullah dkk., 2022).

Hambatan terhadap pembangunan adalah kemiskinan, yang ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan lambatnya pembangunan, yang pada akhirnya menyebabkan kesenjangan sosial. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan umumnya memiliki keterbatasan dalam akses terhadap pekerjaan dan peluang ekonomi, karena mereka tertinggal dibandingkan dengan masyarakat lain dengan potensi ekonomi yang lebih besar. (Hanif Muzaqi dkk., 2022). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk menggambarkan sejauh mana individu dapat merasakan hasil dari proses pembangunan, termasuk akses terhadap penghasilan, kesehatan, dan pendidikan. Meskipun belanja modal merupakan bagian penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, namun hal itu bukanlah tujuan akhir dari pembangunan manusia. Belanja modal bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan bagaimana mereka memanfaatkan kapasitas tersebut. (Yanuar dkk., t.t.).

Pemerintah, melalui petunjuk Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020, mengimplementasikan strategi pencegahan pandemi COVID-19 di tingkat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Langkah ini bertujuan untuk

melindungi kesehatan dan mengatasi dampak ekonomi pandemi di tingkat lokal, khususnya di Desa Medan Sinembah. Kebijakan tersebut mempercepat pencairan dana desa untuk program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) serta menyediakan Bantuan Tunai Langsung sebagai jaringan pengaman sosial. Program ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat desa yang terdampak ekonomi, di mana banyak yang kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan finansial selama pandemi. (Lalira¹ dkk., t.t.).

Program BLT dari dana desa menjadi solusi yang unik karena dana disalurkan langsung ke desa. Ini mengatasi masalah hierarki dalam pendistribusian bantuan sosial dan mengurangi risiko penyimpangan. (Manggu, 2019). Tantangan utama dalam pelaksanaan program BLT Desa adalah dinamisnya data penerima BLT yang dapat berubah secara bertahap. Verifikasi penerima BLT yang dilakukan melalui musyawarah di Desa Medan Sinembah memiliki peranan yang sangat penting, di mana perangkat desa harus terlibat secara langsung dalam proses tersebut. Meskipun tugas ini tidak mudah, namun hal tersebut penting dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Sofi, 2021), efektivitas BLT dalam pemulihan ekonomi desa seringkali terganggu oleh ketidakakuratan data penerima dan distribusi dana yang tidak tepat. Oleh karena itu, penting bagi alokasi bantuan sosial tidak hanya mencakup pendanaan langsung, tetapi juga alokasi untuk mengelola distribusi agar dana tersebut dapat disalurkan dengan akurat dan efisien. Setiap desa data penerima BLT harus transparan dan bisa dijangkau oleh

seluruh masyarakat untuk diperiksa dan disesuaikan kapan pun diperlukan. Semakin terbuka aksesnya, semakin rendah kemungkinan penyimpangan yang mungkin terjadi.

Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketidakmerataan penyaluran dana desa dan ketidaktepatan sasaran dapat mengakibatkan dana desa tidak tepat sasaran, seperti yang terjadi ketika dana disalurkan kepada orang yang ekonominya berkecukupan sementara orang miskin tidak menerima. Hal ini mengurangi efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) meningkatkan perekonomian Desa Medan Sinembah karena banyaknya kebutuhan.

SIMPULAN

Berdasarkan data dan pembahasan yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa Desa Medan Sinembah dinilai belum memadai dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana desa tidak disalurkan dengan merata dimana sebagian dana yang disalurkan kepada orang ekonominya berkecukupan sedangkan orang yang miskin tidak mendapatkan dana desa sama sekali. Kemudian dana desa yang disalurkan pemerintah tidak semuanya disalurkan kepada masyarakat Desa Medan Sinembah, dimana ditahun 2021 dan 2022 hanya sekitaran \pm 50% dari dana yang diberikan pemerintah, dan pada tahun 2023 bahkan tidak sampai \pm 30 % atau 1/3 (satu per tiga) dari dana yang diberikan pemerintah kepada Desa Medan Sinembah. Serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada pada Desa Medan Sinembah tidak dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi karena banyaknya kebutuhan lainnya dari Desa Medan Sinembah.

REFERENSI

- Abdullah, R., Keuangan, K., Perbendaharaan, D., & Gorontalo, P. (2022). PENGARUH DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI GORONTALO. Dalam *JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL* (Vol. 4, Nomor 2).
- Arina, A. I. S., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22–41.
- Dewi, R. S., & Irama, O. N. I. N. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 11. <https://doi.org/10.31289/jab.v4i2.1513>
- Hanif Muzaqi, A., Susanto, D., Abror, M. D., & Ambulanto, T. (2022). Analisis Kebijakan Dana Desa dalam Merespon Masalah Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 6(2), 122–144. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v6i2.4847>
- Hardianto, H. (2022). Determinasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberantasan Kemiskinan Desa: Analisis Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Literature Review Manajemen Keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 266–275. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.872>
- Kehik, B. S., & Mael, dan M. Y. (t.t.). *LIRA 1*.
- Lalira¹, D., Nakoko², A. T., Pingkan, I., Rorong³, F., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (t.t.). *PENGARUH DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KECAMATAN GEMEH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD*.
- Mamonto, C., Rotinsulu, T. O., & Tolosang, K. D. (t.t.). *LIRA 2*.
- Mangu, B. (2019). Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa. *JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.31932/jpe.v2i1.459>
- Nondangari, F. (2023). Analisis fungsi perangkat desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa tahun anggaran 2022 (Studi kasus pada Desa Hayu Raja 7(1).
- Pasaribu, S. N., Nasution, Y. S. J., & Harmain, H. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Sibito. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 95–111. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3307>
- Sofi, I. (2021). EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM PEMULIHAN EKONOMI DI DESA. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247–262. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>
- Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 514–526.
- Tinambunan, S. M. S., Ridwan, M., & Harahap, R. D. (2023). *Corresponding Mail Author : 4*, 1222–1234.
- Wibowo, H., Mulya, I. T., & Mujiwardhani, A. (2019). Impact of Village Fund Allocations for Regional Development and Community Welfare. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(2), 164–178.
- Yanuar, A., Anwar, C., & A.yanuar@bps.go.id, E. J. (t.t.). *LIRA 7*.

*Nurul Fadhilah Yusri Kembaren, Wahyu Syarvina & Nur Ahmadi Bi Rahmani/ Analisis Alokasi
Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Desa Medan
Sinembah*

Zannah, I., Samri, Y., Nasution, J., & Lubis, A.
W. (2024). *Akuntabilitas Efisiensi Dana
Desa dalam Pembangunan Insfratuktur
Desa Silumajang Tahun 2022*. 7(1).